

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Pembebasan dari
Kewajiban Pencatatan

Kepada:
Yth. BUPATI MUNA
c.q. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
Raha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIK : 2)
Alamat : 3)
Nomor Telepon : 4)

sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:

1. NPWPD : 5)
2. Nama Wajib Pajak : 6)
3. Alamat Wajib Pajak : 7)
4. Jenis Pajak Daerah : 8)
5. Penanggung Jawab : 9)

menyatakan tidak mampu memenuhi kewajiban menyelenggarakan pencatatan sesuai aturan perpajakan daerah dengan alasan:

.....
.....
.....
.....
..... 10),

dan mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pencatatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 11)
**Wajib Pajak / Kuasa Wajib
Pajak *)**

..... 12)

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

Nomor : 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3)
telah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal
..... 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan
yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : 6)
Alamat : 7)
melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang
diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal
..... 11), dengan uraian sebagai berikut:

- I. UMUM
- 1. NPWPD : 12)
 - 2. Nama Wajib Pajak : 13)
 - 3. Alamat Wajib Pajak : 14)
 - 4. Jenis Pajak Daerah : 15)
- II. DASAR HUKUM
- a. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - b. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

III. HASIL PENELITIAN

No	Indikator	Hasil Penelitian 16)	Keterangan 17)
1.	Bentuk Usaha		
	• Bentuk usaha		
	• Kepemilikan usaha		
2.	Kemampuan Manajerial		
	• Penggunaan mesin cash register		
	• Bon penjualan (bill) yang digunakan		
	• Pembukuan/pencatatan omzet yang dilakukan		
	• Jumlah pegawai		
	• Pegawai khusus yang bertugas sebagai kasir, bagian keuangan, atau akuntansi		
3.	Omzet Usaha		
	• Rata-rata omzet harian dan bulanan		
	• Rata-rata jumlah tamu/pengunjung harian		

.....
.....
..... 18)

IV. SIMPULAN DAN USUL

5. Simpulan

- ☐ Mengabulkan 19)
- ☐ Menolak

6. Usul

.....
..... 20)

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang

Raha, 21)
Petugas Peneliti 1

.....
23)

NIP.

..... 22)

NIP

Petugas Peneliti 2

.....

NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang

.....
24)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 6) tanggal 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Menimbang**: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan nomor 8) tanggal 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak *) atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan untuk:

- | | | | |
|-----------------------|---|-------|-----|
| 1. NPWPD | : | | 10) |
| PEMBEBASAN | | | |
| 2. Wajib Pajak | : | | 11) |
| 3. Alamat Wajib Pajak | : | | 12) |
| 4. Jenis Pajak Daerah | : | | 13) |

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- KETIGA** : Kewajiban pembayaran pajak daerah oleh Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SKPD yang dihitung secara jabatan oleh Bapenda berdasarkan hasil penelitian terhadap omzet rata-rata dari Wajib Pajak dalam tiga bulan terakhir.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di RAHA
pada tanggal 14)
KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA,

..... 15)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan, atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 6) tanggal 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Pencatatan nomor 8) tanggal 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban pembukuan atau pencatatan dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PENCATATAN**

PERTAMA : ~~Mengabulkan~~ / Menolak *) atas permohonan pembebasan dari kewajiban pencatatan untuk:

1. NPWPD : 10)

2. Wajib Pajak : 11)

3. Alamat Wajib Pajak : 12)

Jenis Pajak Daerah :

4. 13)

- KEDUA** : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku
- KETIGA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA,**

..... 15)
NIP.

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Legalisasi/Perforasi
Tiket/Karcis

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
di
Raha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

1)

NIK

:

2)

Alamat

:

3)

Nomor Telepon

:

4)

sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:

1. NPWPD

:

5)

2. Nama Wajib Pajak

:

6)

3. Alamat Wajib Pajak

:

7)

4. Jenis Pajak Daerah

:

8)

5. Penanggung Jawab

:

9)

mengajukan permohonan legalisasi/perforasi untuk:

☐ tiket/karcis

10)

sebanyak 11) bundel dengan jumlah total 12) lembar.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., 13)

Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

..... 14)

*) coret yang tidak perlu

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/ Perforasi Bon Penjualan *(Bill)*

Kepada:

Yth. BUPATI MUNA

c.q.Kepala Badan Pendapatan Daerah

di Raha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : 1)
- NIK : 2)
- Alamat : 3)
- Nomor Telepon : 4)
- sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:
1. NPWPD : 5)
2. Nama Wajib Pajak : 6)
3. Alamat Wajib Pajak : 7)
4. Jenis Pajak Daerah : 8)
5. Penanggung Jawab : 9)

mengajukan permohonan untuk dikecualikan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan *(bill)* dengan alasan telah menggunakan sistem atau mesin transaksi pembayaran berupa:

- ☐ sistem informasi berbasis komputer. 10)
- ☐ mesin cash register.

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan:

4. surat pernyataan kesediaan tetap menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan dan kesanggupan menyimpan data transaksi;
5. spesifikasi (jenis, tipe, dan tahun pembuatan) sistem atau mesin transaksi pembayaran yang digunakan; dan
6. mekanisme kerja sistem pengendali internal terkait penggunaan sistem atau mesin transaksi pembayaran.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 11)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

***)**

..... 12)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 1)
NIK : 2)
Pekerjaan/Jabatan : 3)
Alamat : 4)

dalam hal ini bertindak selaku:

☐ Wajib Pajak ☐ Wakil ☐ Kuasa 5)

dari Wajib Pajak:

NPWPD : 6)
Nama Wajib Pajak : 7)
Alamat Wajib Pajak : 8)
Jenis Pajak Daerah : 9)

dengan ini menyatakan bahwa sehubungan dengan penggunaan sistem atau mesin transaksi pembayaran sebagai pengganti dari penggunaan bon penjualan (*bill*) yang harus dilegalisasi/perforasi oleh Bapenda, kami bersedia:

1. tetap menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menyimpan data transaksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun; dan
3. melaporkan kepada Bapenda dalam hal terjadi kerusakan sistem atau mesin transaksi pembayaran paling lama 3 (tiga) hari terhitung pada saat terjadinya kerusakan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

....., 10)
Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp10.000,-

..... 11)



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

LAPORAN HASIL PENELITIAN PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

Nomor : 1)

Berdasarkan Surat Tugas nomor 2) tanggal 3) telah dilakukan penelitian dari tanggal 4) sampai dengan tanggal 5) terhadap permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) yang diajukan oleh Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) :

Nama : 6)

Alamat : 7)

melalui surat nomor 8) tanggal 9) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 10) tanggal 11), dengan uraian sebagai berikut:

I. UMUM

1. NPWPD : 12)
2. Nama Wajib Pajak : 13)
3. Alamat Wajib Pajak :
..... 14)
4. Jenis Pajak Daerah : 15)

II. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

III. HASIL PENELITIAN

No	Indikator	Hasil Penelitian 16)	Keterangan 17)
1.	Sistem atau mesin transaksi pembayaran yang digunakan	<input type="checkbox"/>	Sistem informasi berbasis komputer
		<input type="checkbox"/>	Mesin cash register
2.	Jenis/Merek		
3.	Tipe		
4.	Tahun Pembuatan		
5.	Pemasangan alat perekam transaksi (tapping box)		

.....
..... 18)

IV. SIMPULAN DAN USUL

1. Simpulan

☐

Mengabulkan

19)

☐

Menolak

2. Usul

.....
.....
..... 20)

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang

Raha, 21)
Petugas Peneliti 1

.....
23)
NIP.

..... 22)
NIP

Petugas Peneliti 2

.....
NIP

Menyetujui,
Kepala Bidang

.....
24)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA

NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN
LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Membaca** : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/ perforasi bon penjualan (bill), atas nama Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 6) tanggal 7), perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) dimaksud;
- Menimbang** : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (Bill) nomor 8) tanggal 9) perlu menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) dimaksud;
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/ PERFORASI BON PENJUALAN (BILL)**
- PERTAMA** : Mengabulkan / Menolak *) atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (bill) untuk:

1. NPWPD	:	10)
2. Wajib Pajak	:	11)
3. Alamat Wajib Pajak	:	12)
4. Jenis Pajak	:	13)

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14)

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA,**

..... 15)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA

NOMOR 2)

TENTANG

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN

LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (*BILL*)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/
perforasi bon penjualan (*bill*), atas nama Wajib Pajak/kuasa
Wajib Pajak *) 3) nomor 4) tanggal
..... 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
..... 6) tanggal 7), perlu diterbitkan
keputusan atas permohonan pembebasan dari kewajiban
legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Pembebasan dari Kewajiban
Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) nomor
..... 8) tanggal 9) perlu
menetapkan keputusan pembebasan dari kewajiban
legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
2. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. MUNA TENTANG PEMBEBASAN DARI
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN
(*BILL*)**

PERTAMA : Mengabulkan / Menolak *) atas permohonan pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) untuk:

- 1. NPWPD : 10)
- 2. Wajib Pajak : 11)
- 3. Alamat Wajib Pajak : 12)
- 4. Jenis Pajak Daerah : 13)

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, Wajib Pajak tetap dibebankan kewajiban untuk melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 14)
**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA,**

..... 15)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA
NOMOR 2)

TENTANG

PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 3) TENTANG PEMBEBASAN DARI
KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (*BILL*)

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan data/informasi yang diperoleh Bapenda dan hasil penelitian lapangan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah oleh Wajib Pajak 4) terkait pemberian pembebasan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*), perlu menetapkan keputusan pencabutan surat keputusan tentang pembebasan dari kewajiban legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*);
- Mengingat** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten MUNA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah ;
2. Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KAB. MUNA TENTANG PENCABUTAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 5)**
TENTANG PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN LEGALISASI/PERFORASI BON PENJUALAN (*BILL*)

- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Nomor 6) tentang Pembebasan dari Kewajiban Legalisasi/Perforasi Bon Penjualan (*Bill*) yang diberikan kepada:
1. NPWPD : 7)
 2. Wajib Pajak : 8)
 3. Alamat Wajib Pajak : 9)
 4. Jenis Pajak Daerah : 10)


- KEDUA** : Sesuai diktum PERTAMA, Wajib Pajak kembali dibebankan kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Terhadap pencabutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Wajib Pajak dapat diberikan kembali pembebasan dari kewajiban melakukan legalisasi/perforasi bon penjualan (*bill*) berdasarkan hasil evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Raha
pada tanggal


11)


**KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH
KAB. MUNA,**


..... 12)
NIP.


	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PERHOTELAN		
DATA WAJIB PAJAK		
1. NPWPD :	Kepada Yth	
2. NAMA USAHA :	Kepala Bapenda Kabupaten Muna	
3. KETERANGAN :	di Raha	
PERHATIAN		
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak		
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan		
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya		
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi		
Jenis PBJT atas jasa perhotelan :		
OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK		
Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):		
a. MASA PAJAK :	<input type="text"/>	
b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10%
d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen):		
a. MASA PAJAK :	<input type="text"/>	
b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	<input type="text"/>
c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :		10%
d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp	<input type="text"/>
PERNYATAAN		
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA		RAHA. TANGGAL <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
		TTD _____ Nama Jelas
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA		
DITERIMA TANGGAL :		
NAMA PETUGAS :		
NIP :	_____	


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS MAKANAN DAN MINUMAN</p>		
<p>DATA WAJIB PAJAK</p>		
<p>1. NPWPD : 2. NAMA USAHA : 3. KETERANGAN :</p>		<p>Kepada Yth Kepala Bapenda Kabupaten Muna di Raha</p>
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi</p>		
<p>Jenis PBJT atas Makanan dan/atau Minuman :</p>		
<p>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>		
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):</p> <p>a. MASA PAJAK : <input type="text"/></p> <p>b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : Rp <input type="text"/></p> <p>c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA : 10%</p> <p>d. PAJAK YANG TERUTANG : Rp <input type="text"/></p>		
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen):</p> <p>a. MASA PAJAK : <input type="text"/></p> <p>b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : Rp <input type="text"/></p> <p>c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA : 10%</p> <p>d. PAJAK YANG TERUTANG : Rp <input type="text"/></p>		
<p>PERNYATAAN</p> <p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUHAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA</p> <p>RAHA, TANGGAL <input type="text"/><input type="text"/> / <input type="text"/><input type="text"/> / <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/></p> <p>TTD _____ Nama Jelas</p>		
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p>		
<p>DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP : _____</p>		


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :</p>								
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN</p>										
<p>DATA WAJIB PAJAK</p>										
<p>1. NPWPD : 2. NAMA USAHA : 3. KETERANGAN :</p>		<p>Kepada Yth Kepala Bapenda Kabupaten Muna di Raha</p>								
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi</p>										
<p>Jenis PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan :</p>										
<p>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>										
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):</p> <table><tr><td>a. MASA PAJAK :</td><td></td></tr><tr><td>b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :</td><td>Rp</td></tr><tr><td>c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :</td><td>10%</td></tr><tr><td>d. PAJAK YANG TERUTANG :</td><td>Rp</td></tr></table>			a. MASA PAJAK :		b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :	10%	d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp
a. MASA PAJAK :										
b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp									
c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :	10%									
d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp									
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen):</p> <table><tr><td>a. MASA PAJAK :</td><td></td></tr><tr><td>b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :</td><td>Rp</td></tr><tr><td>c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :</td><td>10%</td></tr><tr><td>d. PAJAK YANG TERUTANG :</td><td>Rp</td></tr></table>			a. MASA PAJAK :		b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp	c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :	10%	d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp
a. MASA PAJAK :										
b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) :	Rp									
c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA :	10%									
d. PAJAK YANG TERUTANG :	Rp									
<p>PERNYATAAN</p> <p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUARAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA</p> <p>RAHA, TANGGAL / /</p> <p>TTD _____ Nama Jelas</p>										
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p>										
<p>DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP : _____</p>										

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :</p>
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS TENAGA LISTRIK</p>		
<p>DATA WAJIB PAJAK</p>		
<p>1. NPWPD : 2. NAMA WAJIB PAJAK : 3. KETERANGAN :</p>		<p>Kepada Yth Kepala Bapenda Kabupaten Muna di Raha</p>
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi</p>		
<p>Jenis PBJT atas Tenaga Listrik :</p>		
<p>OMZET YANG HARUS DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>		
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terhutang untuk masa pajak sebelumnya (akumulasi dari awal masa pajak dalam tahun pajak tertentu):</p>		
<p>a. MASA PAJAK : b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA : d. PAJAK YANG TERUTANG :</p>		<p><input type="text"/> Rp <input type="text"/> 10% Rp <input type="text"/></p>
<p>Jumlah Omzet dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan Fotocopy Dokumen):</p>		
<p>a. MASA PAJAK : b. DASAR PENGENAAN PAJAK (OMZET) : c. TARIF PAJAK SESUAI PERDA : d. PAJAK YANG TERUTANG :</p>		<p><input type="text"/> Rp <input type="text"/> 10% Rp <input type="text"/></p>
<p>PERNYATAAN</p>		
<p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUARAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA</p>		<p>RAHA, TANGGAL <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> / <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> / <input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/><input type="text"/> TTD _____ Nama Jelas</p>
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p>		
<p>DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :</p>		<p>_____</p>

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	MASA PAJAK :												
		TAHUN PAJAK :												
		NO. TAGIH/BAYAR :												
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PBJT ATAS JASA PARKIR														
DATA WAJIB PAJAK														
1. NPWPD :	Kepada Yth													
2. NAMA USAHA :	Kepala Bapenda Kabupaten Muna													
3. KETERANGAN :	di Raha													
PERHATIAN														
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak														
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan														
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya														
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi														
Jenis PBJT atas Jasa Parkir :														
DIISI OLEH WAJIB PAJAK														
1. Data Objek Pajak														
NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	JUMLAH KENDARAAN	DASAR PENGENAAN										
1	Roda 4 (standar)													
2	Roda 2													
Total Dasar Pengenaan														
Tarif Pajak Parkir				10%										
Parak Terhutang														
PERNYATAAN														
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUHAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA			RAHA, TANGGAL											
			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>											
			TTD											
			Nama Jelas											
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA														
DITERIMA TANGGAL :														
NAMA PETUGAS :														
NIP :														

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH</p>	<p>MASA PAJAK : TAHUN PAJAK : NO. TAGIH/BAYAR :</p>															
<p>SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK MBLB</p>																	
<p>DATA WAJIB PAJAK</p>																	
<p>1. NPWPD : 2. NAMA USAHA : 3. KETERANGAN :</p>		<p>Kepada Yth Kepala Bapenda Kabupaten Muna di Raha</p>															
<p>PERHATIAN</p> <p>1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak 2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan 3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya 4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi</p>																	
<p>Jenis Pajak MBLB :</p>																	
<p>DIISI OLEH WAJIB PAJAK</p>																	
<p>1. Data Objek Pajak</p>																	
<table><tr><th>No</th><th>Uraian</th><th>Volume/Tonase (M3/Ton)</th><th>Harga Patokan</th></tr><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	No	Uraian	Volume/Tonase (M3/Ton)	Harga Patokan													
No	Uraian	Volume/Tonase (M3/Ton)	Harga Patokan														
<p>Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan fotocopy dokumen)</p>																	
<table><tr><th>No</th><th>Rekening</th><th>Dasar Pengenaan</th><th>Tarif Pajak Sesuai Perda</th><th>Pajak Terutang</th><th>Pembulatan</th><th>Jumlah dibayar</th></tr><tr><td>1</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>	No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak Sesuai Perda	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah dibayar	1							<p>Jumlah Total</p>		
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak Sesuai Perda	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah dibayar											
1																	
<p>PERNYATAAN</p>																	
<p>DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUARAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA</p>			<p>RAHA, TANGGAL</p> <table><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table>														
			<p>TTD</p> <p>_____</p> <p>Nama Jelas</p>														
<p>DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA</p>																	
<p>DITERIMA TANGGAL : NAMA PETUGAS : NIP :</p>			<p>_____</p>														

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	MASA PAJAK :											
		TAHUN PAJAK :											
		NO. TAGIH/BAYAR :											
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD) PAJAK SARANG BURUNG WALET													
DATA WAJIB PAJAK													
1. NPWPD :		Kepada Yth											
2. NAMA USAHA :		Kepala Bapenda Kabupaten Muna											
3. KETERANGAN :		di Raha											
PERHATIAN													
1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf cetak													
2. Beri Nomor pada Kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan													
3. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan kembali Kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya													
4. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut di atas akan dikenakan sanksi													
Jenis Pajak Sarang Burung Walet :													
DIISI OLEH WAJIB PAJAK													
1. Data Objek Pajak													
No	Uraian	Volume/Tonase (M3/Ton)	Harga Patokan										
Jumlah Pembayaran dan Pajak Terutang untuk masa pajak sekarang (Lampirkan fotocopy dokumen)													
No	Rekening	Dasar Pengenaan	Tarif Pajak Sesuai Perda	Pajak Terutang	Pembulatan	Jumlah dibayar							
1													
Jumlah Total													
PERNYATAAN													
DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA TERMASUK SANKSI-SANKIS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERTAUARAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, SAYA MENYATAKAN BAHWA YANG DIBERITAHUKAN DI ATAS BESERTA				RAHA, TANGGAL									
				<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									
				TTD									
				Nama Jelas									
DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA													
DITERIMA TANGGAL :													
NAMA PETUGAS :													
NIP :													

		PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH		SSPD BPHTB			
		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN		LEMBAR KE _____ UNTUK _____			
A. DATA WAJIB PAJAK							
1	NAMA WAJIB PAJAK	:					
2	NPWP	:					
3	ALAMAT WAJIB PAJAK	:					
4	KELURAHAN/DESA	:		5. RT/RW	: - / -		
				6. Kecamatan	:		
7	KOTA/KAB	:		8. Kode Pos	:		
B. DATA OBJEK PAJAK							
1	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP) PBB-P2	:	<input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>				
2	LETAK TANAH DAN BANGUNAN	:					
3	KELURAHAN/DESA	:	4. RT/RW : - / -				
5	KECAMATAN	:	6. KABUPATEN MUNA				
Perhitungan NJOP PBB-P2							
URAIAN		LUAS (M2)		NJOP PBB-P2 (Rp/M2)		LUAS X NJOP PBB-P2 (Rp)	
		(DIISI LUAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG HAKNYA DIPEROLEH)		(DIISI BERDASARKAN SPPT PBB PERKOTAAN TAHUN TERJADINYA PEROLEHAN HAK/TAHUN ...)			
TANAH/ BUMI		7		9		11	
BANGUNAN		8		10		12	
						13	
				NJOP			
				14 HARGA TRANSAKSI/		Rp. <input type="text"/>	
				NILAI PASAR*)			
15	JENIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	:	<input type="text"/> <input type="text"/>				
16	PENGENAAN PENGURANGAN	:	Rp. <input type="text"/>				
17	NOMOR SERTIFIKAT	:					
C. AKUMULASI PEROLEHAN SEBELUMNYA				Rp	<input type="text"/>		
D. PENGHITUNG BPHTB (Berdasarkan perhitungan wajib pajak)							
1	NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK (NPOP) (DIISI DENGAN NILAI YANG LEBIH TINGGI DIANTARA B. 13 ATAU B. 14 DAN C)	:	Rp	<input type="text"/>			
2	NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NPOPTKP)	:	Rp	<input type="text"/>			
3	NILAI PEROLEHAN OBJEK KENA PAJAK (NPOPKP) (DIISI DENGAN ANGKA 1 - ANGKA 2)	:	Rp	<input type="text"/>			
4	BPHTB YANG TERUTANG (5% X angka 3)	:	Rp	<input type="text"/>			
5	PENGENAAN PENGURANGAN KARENA (%) (% x angka 4)	:	Rp	<input type="text"/>			
6	BPHTB	:	Rp	<input type="text"/>			
E. JUMLAH SETORAN BERDASARKAN							
<input type="text"/> a. Perhitungan Wajib Pajak							
<input type="text"/> b. STPD BPHTB/SKPDKB/SKPDKBT							
<input type="text"/> c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi							
<input type="text"/> d.							

Lampiran	: 1 berkas	Kepada:
Perihal	: Permintaan Keterangan	Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
	Penghitungan Pajak	Kabupaten Muna
		di
		Raha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	1)
NIK	:	2)
Alamat	:	3)
Nomor Telepon	:	4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa / Wakil Wajib Pajak *), atas:			
1. NOP / NPWPD *)	:	5)
2. Nama Wajib Pajak	:	6)
3. Alamat Wajib Pajak	:	7)
4. Jenis Pajak Daerah	:	8)

mengajukan permintaan keterangan penghitungan pajak yang terutang sebagai bahan untuk penyampaian SPTPD / SSPD BPHTB *) dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

Sebagai bahan pertimbangan penghitungan, kami lampirkan: 9)
(untuk jenis pajak BPHTB)

- ☐ Fotokopi SPPT PBB-P2
- ☐ Gambar peta posisi relatif bidang tanah dan fotokopi SPPT PBB-P2 Per objek pajak yang berbatasan langsung
- ☐ Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau IMB
- ☐ Fotokopi Surat Keterangan Waris / Akta Hibah *)

(untuk jenis pajak daerah lainnya)

- ☐ Salinan Bon Penjualan (Bill)
- ☐ Rekapitulasi pencatatan transaksi

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

....., 10)
Wajib Pajak / Kuasa /
Wakil Wajib Pajak *)

..... 11)

*) coret yang tidak perlu

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

[illegible][illegible]


9 JENIS PENGGUNAAN LAHAN	:	<input type="checkbox"/> PERUMAHAN	<input type="checkbox"/> PERDAGANGAN/ PERKANTORAN	<input type="checkbox"/> GUDANG/INDUSTRI
		<input type="checkbox"/> KAPLING SIAP BANGUN	<input type="checkbox"/> SAWAH/KEBUN	
10 LUAS BUMI (M2)	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	11. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
12 NILAI BANGUNAN (Rp)	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
		<input type="checkbox"/> NILAI SISMIOP	<input type="checkbox"/> NILAI DBKB 2000	<input type="checkbox"/> ANALISIS RAB
13 LEMBAR SISI DEPAN (M)	:	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	14 KETINGGIAN DARI JALAN (M) :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
15 BENTUK BIDANG	:	<input type="checkbox"/> PRESEGI	<input type="checkbox"/> TIDAK BERATURAN	
16 POSISI BIDANG	:	<input type="checkbox"/> SUDUT	<input type="checkbox"/> TENGAH	<input type="checkbox"/> UJUNG
				<input type="checkbox"/> TUSUK SATE
17 HAK KEPEMILIKAN	:	<input type="checkbox"/> HAK MILIK	<input type="checkbox"/> HGB	<input type="checkbox"/> HGU
		<input type="checkbox"/> HAK MILIK SATUAN RUMAH SUSUN	<input type="checkbox"/> TANAH GIRIK/PETOK/VERPONDING	<input type="checkbox"/> HAK PAKAI


18 HARGA TRANSAKSI (Rp)	:	<input type="text"/>											
19 SUMBER DATA	<input type="checkbox"/> PEMBELI/ PENJUAL*)	<input type="checkbox"/> AGEN/ MAKELAR	<input type="text"/>										
	<input type="checkbox"/> LURAH	<input type="checkbox"/> LAINNYA	<input type="text"/>										


URAIAN	LUAS (M2)		NJOP PERKOTAAN (Rp/M2)		LUAS (M2)	
TANAH/ BUMI	a.		c.		e.	
BANGUNAN	b.		d.		f.	
NJOP					g.	

PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG				
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN
A.	NJOP			
B.	NPOPTKP			
C.	NPOP KP			
D.	BPHTB YANG TERUTANG			
E.	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
F.	POKOK BPHTB YANG HARUS DIBAYAR			
G.	KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
H.	BPHTB YANG HARUS DIBAYAR			
I.	SANKSI ADMINISTRASI			
J.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH		NOMOR PELAYANAN <div></div>		
	LEMBAR PENELITIAN AWAL PBJT ATAS MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN		TANGGAL PENELITIAN <div></div> / <div></div> / <div></div>		
1 NAMA PEMOHON :		<div></div>			
2 ALAMAT PEMOHON :		<div></div>			
3 NOMOR TELEPON :		<div></div>			
4 NPWPD :		<div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div>			
5 NAMA WAJIB PAJAK :		<div></div>			
6 ALAMAT WAJIB PAJAK :		<div></div>			
7 SUMBER DATA :		<div></div> SALINAN BON PENJUALAN (BILL) <div></div> REKAPITULASI TRANSAKSI <div></div> DATA TAPPING BOX			
8 PENGHITUNGAN PAJAK YANGTERUTANG					
#	NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
			WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
	1	PEMBAYARAN DARI			
		A) PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN			
		B) SERVICE CHARGE			
		C) PENDAPATAN LAIN-LAIN			
	2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
	3	TARIF 10%			
	4	PAJAK YANG TERUTANG			
	5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
	6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	7	KOMPENSASI PAJAK.PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
	8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	9	SANKSI ADMINISTRASI			
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR				
TERBILANG :					
DIHITUNG		DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :	

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA		NOMOR PELAYANAN																																																																														
	BADAN PENDAPATAN DAERAH		<div></div>																																																																														
	LEMBAR PENELITIAN AWAL		TANGGAL PENELITIAN																																																																														
PBJT ATAS TENAGA LISTRIK		<div> / <div> / <div></div></div></div>																																																																															
1 NAMA PEMOHON : <div></div>																																																																																	
2 ALAMAT PEMOHON : <div></div>																																																																																	
3 NOMOR TELEPON : <div></div>																																																																																	
4 NPWPD : <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div>																																																																																	
5 NAMA WAJIB PAJAK : <div></div>																																																																																	
6 ALAMAT WAJIB PAJAK : <div></div>																																																																																	
7 MESN PEMBANGKIT LISTRIK YANG DIGUNAKAN :																																																																																	
NAMA/ TIPE : <div></div>																																																																																	
KAPASITAS/ BATAS DAYA : <div></div> VA																																																																																	
JAM PENGGUNAAN : <div></div> JAM																																																																																	
8 PENGHITUNGAN PAJAK YANGTERUTANG																																																																																	
<table><tr><th rowspan="2">NO</th><th rowspan="2">URAIAN</th><th colspan="3">PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)</th></tr><tr><th>WAJIB PAJAK</th><th>FIKSUS</th><th>PEMBAHASAN</th></tr><tr><td>1</td><td>PENGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>A) DAYA PASANG</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>B) JAM PENGGUNAAN</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>D) FAKTOR DAYA 0.85</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>TARIF 3 % atau</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>PAJAK YANG TERUTANG</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>7</td><td>KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>PAJAK YANG HARUS DIBAYAR</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td>SANKSI ADMIISTRASI</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)			WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN	1	PENGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK					A) DAYA PASANG					B) JAM PENGGUNAAN					C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH					D) FAKTOR DAYA 0.85				2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)				3	TARIF 3 % atau				4	PAJAK YANG TERUTANG				5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)				6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR				7	KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR				8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR				9	SANKSI ADMIISTRASI					JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)																																																																															
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN																																																																													
1	PENGUNAAN PEMBANGKIT LISTRIK																																																																																
	A) DAYA PASANG																																																																																
	B) JAM PENGGUNAAN																																																																																
	C) BIAYA PEMAKAIAN PER KWH																																																																																
	D) FAKTOR DAYA 0.85																																																																																
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)																																																																																
3	TARIF 3 % atau																																																																																
4	PAJAK YANG TERUTANG																																																																																
5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)																																																																																
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR																																																																																
7	KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR																																																																																
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR																																																																																
9	SANKSI ADMIISTRASI																																																																																
	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR																																																																																
TERBILANG :																																																																																	
Ket : 1. PBJT atas Tenaga Listrik untuk : a. Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber lain oleh Industri, Pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif sebesar 3 (tiga) % b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri tarif sebesar 1.5 (satu koma lima) %																																																																																	
DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :																																																																														

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	NOMOR PELAYANAN <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> TANGGAL PENELITIAN <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
	LEMBAR PENELELITIAN AWAL PBJT JASA PARKIR	

1 NAMA PEMOHON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
2 ALAMAT PEMOHON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
3 NOMOR TELEPON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
4 NPWPD	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>
5 NAMA WAJIB PAJAK	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>


7 SUMBER DATA	:	<input type="checkbox"/> SALINAN KARCIS	<input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> DATA TAPPING BOX
---------------	---	---	--	---

8 PENGHITUNGAN PAJAK YANGTERUTANG

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
1	PEMBAYARAN DARI			
	A) PARKIR RODA DUA			
	1) SEPEDA			
	2) SEPEDA MOTOR			
	B) PARKIR RODA EMPAT ATAU LEBIH			
	1) MOBIL PENUMPANG/PICK UP/ SEJENISNYA			
	2) TRUK/BUS SEDANG/ BUSKECIL/ SEJENISNYA			
	3) TRUK GANDENG/BUS BESAR/ SEJENISNYA			
2	2 DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	3 TARIF 10 %			
4	4 PAJAK TERUTANG			
5	5 PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK			
6	6 POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	7 KOMPENSASI PAJAK/ PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR			
8	8 PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	9 SANKSI ADMMISTRASI			
10	10 JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR			

TERBILANG :

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	NOMOR PELAYANAN <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> TANGGAL PENELITIAN <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>
	LEMBAR PENELITIAN AWAL PAJAK MBLB	


1 NAMA PEMOHON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
2 ALAMAT PEMOHON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
3 NOMOR TELEPON	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
4 NPWPD	:	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px;"></div> </div>
5 NAMA WAJIB PAJAK	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>
6 ALAMAT WAJIB PAJAK	:	<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px;"></div>

7 SUMBER DATA	:	<input type="checkbox"/> SALINAN KARCIS	<input type="checkbox"/> REKAPITULASI TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> DATA TAPPING BOX
---------------	---	---	---	---

8 PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
		WAJIB PAJAK	FKSUS	PEMBAHASAN
1	OMZET BERDASARKAN VOLUME/PENJUALAN			
2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
3	TARIF 20% / 10%			
4	PAJAK YANG TERUTANG			
5	PENGATURAN PENGENAAN/PENGURANGAN PAJAK*)			
6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
7	KOMPENSASI PAJAK PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
9	SANSKSI ADMINISTRASI			
10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :				

DIHITUNG	DITELITI	DISETUIJI	CATATAN :

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	NOMOR PELAYANAN <div></div>			
	LEMBAR PENELELITIAN AWAL PAJAK SARANG BURUNG WALET	TANGGAL PENELITIAN <div></div> / <div></div> / <div></div>			
1 NAMA PEMOHON :		<div></div>			
2 ALAMAT PEMOHON :		<div></div>			
3 NOMOR TELEPON :		<div></div>			
4 NPWPD :		<div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div> - <div></div>			
5 NAMA WAJIB PAJAK :		<div></div>			
6 ALAMAT WAJIB PAJAK :		<div></div>			
7 SUMBER DATA :		<div></div> VOLUME <div></div> REKAPITULASI TRANSAKSI <div></div> SUMBER LAIN			
8 PENGHITUNGAN PAJAK YANGTERUTANG					
#	NO	URAIAN	PENGHITUNGAN MENURUT (Rp)		
			WAJIB PAJAK	FIKSUS	PEMBAHASAN
	1	OMZET BERDASARKAN VOLUME/PENJUALAN			
	2	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)			
	3	TARIF 5%			
	4	PAJAK YANG TERUTANG			
	5	PENGATURAN PENGENAAN/ PENGURANGAN PAJAK*)			
	6	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	7	KOMPENSASI PAJAK.PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR*)			
	8	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR			
	9	SANKSI ADMINISTRASI			
	10	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR			
TERBILANG :					
DIHITUNG		DITELITI	DISETUJUI	CATATAN :	



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

Raha, 2)
Nomor : 3) Sdr. 4)
Lampiran : 1 Bundel di
Perihal : Pemberitahuan SPTPD Tempat
Dianggap tidak disampaikan

Sehubungan dengan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak 5) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 6) tanggal 7), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa:
 - (1) SPTPD wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan ke Bapenda.
 - (2) Dalam hal SPTPD ditandatangani oleh kuasa Wajib Pajak, SPTPD harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - (3) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang; dan
 - b. SSPD lembar 2 yang telah divalidasi.
 - (4) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani; dan
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen.
2. Berdasarkan penelitian kami, penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi ketentuan Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024, yaitu:
 - a. 8)
 - b.
 - c. dst,sehingga penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak disampaikan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat menyampaikan kembali SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA**

..... 9)
NIP.

Lampiran : 1 berkas
Perihal : Perpanjangan
Penyampaian SPTPD

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabu[aten MUNA
di
Raha

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : 1)
NIK : 2)
Alamat : 3)
Nomor Telepon : 4)
sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *), atas:
1. NPWPD : 5)
2. Nama Wajib Pajak : 6)
3. Alamat Wajib Pajak : 7)
4. Jenis Pajak Daerah : 8)
5. Penanggung Jawab : 9)
mengajukan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD untuk Masa
Pajak 10) dengan alasan
..... 11).

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

..... 12)
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)

..... 13)

*) coret yang tidak perlu



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

Raha, 2
Nomor : 3) Sdr. 4)
Lampiran : 1 bundel di
Perihal : Pemberitahuan perpanjangan Tempat
Penyampaian SPTPD tidak dapat
dipertimbangkan

Sehubungan dengan permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara untuk Masa Pajak 5) melalui surat nomor 6) tanggal 7) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 8) tanggal 9), bersama ini disampaikan bahwa:

1. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur bahwa:
 - a. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - diajukan kepada Kepala Bapenda;
 - diajukan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPTPD;
 - dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan perpanjangan penyampaian SPTPD;
 - dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut:
 1. fotocopi kartu NPWPD atau fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 2. penghitungan sementara pajak terutang yang harus dibayar;
 - surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.
 - b. Pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap bukan merupakan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPTPD.

2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara tidak memenuhi Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024, yaitu:

- a. 10)
- b.
- c. dst

sehingga sesuai ketentuan Peraturan Bupati MUNA Nomor ... Tahun 2024, permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD Saudara dianggap tidak dapat dipertimbangkan dan terlampir dikembalikan berkas terkait.

3. Saudara dapat mengajukan kembali permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA**

..... 11)
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

Raha, 2)

Nomor : 3)

Sdr. 4)

Lampiran : 1 bundel

di

Perihal : Pemberitahuan Perpanjangan
Penyampaian SPTPD

Raha

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 5) tanggal
..... 6) yang diterima berdasarkan tanda terima nomor 7)
tanggal 8), bersama ini disampaikan bahwa permohonan
perpanjangan penyampaian SPTPD untuk:

1. NPWPD : 9)
 2. Nama Wajib Pajak : 10)
 3. Alamat Wajib Pajak : 11)
 4. Jenis Pajak Daerah : 12)
- telah disetujui dengan batas akhir penyampaian SPTPD Masa Pajak 13)

diperpanjang sampai dengan tanggal 14). Terhadap pajak
yang kurang dibayar akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung sejak jatuh tempo pembayaran
yang seharusnya sebelum adanya persetujuan perpanjangan penyampaian
SPTPD ini sampai dengan tanggal pembayaran.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KAB. MUNA**

..... 15)
NIP.

KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN *)
PENGAMBILAN DATA TRANSAKSI MELALUI PENGAMATAN DI LAPANGAN

Wajib Pajak :
NPWPD :

Alamat Wajib Pajak :
Jam Operasional :

No	Uraian	Jam Pengamatan											
		07.00 19.00	08.00 20.00	09.00 21.00	10.00 22.00	11.00 23.00	11.00 23.00	13.00 01.00	14.00 02.00	15.00 03.00	16.00 04.00	17.00 05.00	18.00 06.00
1	Tgl.												
	Jumlah Kunjungan												
	Jumlah Transaksi												
	Nilai Transaksi												
	Detail Transaksi												
	-												
	-												
	Catatan												
	Jumlah Kunjungan												
	Jumlah Transaksi												
	Nilai Transaksi												
	Detail Transaksi												

Mengetahui
Kepala Sub Bidang.....

Wajib Pajak / Wakil

Petugas Peneliti *)

KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN *)
ANALISIS 1 - RATA-RATA HARIAN

Wajib Pajak
NPWPD
:

Alamat Wajib Pajak :
Jam Operasional :

HARI BIASA

[illegible]

AKHIR PEKAN

[illegible]

KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN *)
ANALISIS 3 - ESTIMASI TRANSAKSI HARIAN

Wajib Pajak :
NPWPD :

Alamat Wajib Pajak :
Jenis Usaha :

HARI BIASA

Uraian	Jam Sibuk				Jam Sibuk				Jam Sibuk			
	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah
Nilai Transaksi												
Detail Transaksi												
-												
-												
-												

AKHIR PEKAN

Uraian	Jam Sibuk			Jam Sibuk			Jam Sibuk					
	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah	Jumlah Jam	Rata-Rata per Jam	Estimasi Transaksi	Estimasi Jumlah
Nilai Transaksi												
Detail Transaksi												
-												
-												
-												

ESTIMASI TRANSAKSI HARIAN

Uraian	Estimasi Jumlah Harian
Hari Biasa	
Akhir Pekan	

KERTAS KERJA PENELITIAN / PEMERIKSAAN *)
ANALISIS 4 – ESTIMASI TRANSAKSI BULANAN

:

:

:

:

Alamat Wajib Pajak
Jenis
Usaha

:

:

	Hari Biasa			Akhir Pekan			E
	Jumlah Hari	Estimasi Jumlah Harian	Sub Jumlah	Jumlah Hari	Estimasi Jumlah Harian	Sub Jumlah	
Estimasi Jumlah Bulanan							

ahui,
Sub Bidang.....


Petugas Analis Data

Menyetujui,
Kepala Bidang.....

.....

.....

.....

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH .	NOMOR NOTA <table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>															
NOTA PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME	LEMBAR UTAMA NOTA PERHITUNGAN																

1	MASA PAJAK	:	
2	TAHUN PAJAK	:	
3	NAMA WAJIB PAJAK	:	
4	ALAMAT WAJIB PAJAK	:	

1	NAMA USAHA	:	
2	ALAMAT USAHA	:	
3	NPWPD	:	
4	URAIAN	:	

A

DASAR PENGENAAN PAJAK

B


SANKSI ADMINISTRASI

1	KENAIKAN	Rp	
2	DENDA	Rp	
3	BUNGA	Rp	
	JUMLAH SANKSI	Rp	
	TOTAL	Rp	

DENGAN HURUF:

MENGETAHUI
KEPALA BIDANG

RAHA,

	PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BADAN PENDAPATAN DAERAH	NOMOR NOTA <div></div>																														
	NOTA PENGHITUNGAN PAJAK AIR TANAH	LEMBAR UTAMA NOTA PERHITUNGAN																														
<div><div>1</div><div>MASA PAJAK</div><div>:</div></div> <div><div>2</div><div>TAHUN PAJAK</div><div>:</div></div> <div><div>3</div><div>NAMA WAJIB PAJAK</div><div>:</div></div> <div><div>4</div><div>ALAMAT WAJIB PAJAK</div><div>:</div></div>																																
<div><div>1</div><div>NAMA USAHA</div><div>:</div></div> <div><div>2</div><div>ALAMAT USAHA</div><div>:</div></div> <div><div>3</div><div>NPWPD</div><div>:</div></div> <div><div>4</div><div>URAIAN</div><div>:</div></div>																																
<div>A DASAR PENGENAAN PAJAK</div> <table><tr><th>VOLUME</th><th>FNA</th><th>HAB</th><th>HAD = (FNA x HAB)</th><th>NPA = (VOLUME x HAD)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total NPA</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Total Volume</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)</td><td></td></tr></table> <div>B SANKSI ADMINISTRASI</div> <div><div>1</div><div>KENAIKAN</div><div>Rp</div></div> <div><div>2</div><div>DENDA</div><div>Rp</div></div> <div><div>3</div><div>BUNGA</div><div>Rp</div></div> <div><div>JUMLAH SANKSI</div><div>Rp</div><div></div></div> <div><div>TOTAL</div><div>Rp</div><div></div></div> <div>DENGAN HURUF:</div>			VOLUME	FNA	HAB	HAD = (FNA x HAB)	NPA = (VOLUME x HAD)														Total NPA					Total Volume					KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)	
VOLUME	FNA	HAB	HAD = (FNA x HAB)	NPA = (VOLUME x HAD)																												
			Total NPA																													
			Total Volume																													
			KETETAPAN PAJAK (Total NPA x 20%)																													
<div><div>MENGETAHUI</div><div>KEPALA BIDANG</div><div></div></div> <div><div>RAHA.</div><div></div></div>																																



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAJAK REKLAME

NOMOR

I. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK REKLAME TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. MASA PAJAK :
5. TEMPAT PEMASANGAN :
6. JENIS REKLAME :
7. BENTUK REKLAME :
8. STATUS REKLAME :
9. REKLAME DIPASANG DI :
10. UKURAN REKLAME : PANJANG M X LEBAR M =
11. JUMLAH PEMASANGAN :
12. MASA PAJAK :
13. JANGKA WAKTU PEMASANGAN :

14. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) JUMLAH	
	B) UKURAN	
	C) NILAI DASAR	
	D) LAMA PEMASANGAN	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	25 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

II. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :

III. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

RAHA,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. MUNA

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Gatoto Subroto No. 167 Kota Raha, Muna, Sulawesi Tenggara, Kode Pos 93614
Telp. (0403) 22544 Pos-el bapendamuna01@gmail.com

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)

PAJAK AIR TANAH

NOMOR

1. NAMA WAJIB PAJAK :
2. ALAMAT WAJIB PAJAK :
3. NPWPD :
4. TUJUAN PEMANFAATAN :
5. LOKASI SUMBER AIR :
6. NAMA/TIPE MESIN POMPAA :
7. KAPASITAS MESIN POMPA :
8. POSISI METER AIR : BULAN
BULAN
9. VOLUME PENGAMBILAN
10. MASA PAJAK
11. PENGHITUNGAN PAJAK YANG TERUTANG

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	PEMBAYARAN DARI	
	A) VOLUME PENGAMBILAN AIR	
	B) HARGA DASAR AIR	
2.	DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)	Rp.
3.	TARIF	20 %
4.	PAJAK YANG TERUTANG	Rp.
5.	PENGATURAN PENGENAAN / PENGURANGAN PAJAK *)	Rp.
6.	POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
7.	KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR *)	Rp.
8.	PAJAK YANG HARUS DIBAYAR	Rp.
9.	SANKSI ADMINISTRASI	Rp.
10.	JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR	Rp.
TERBILANG :		

12. JATUH TEMPO PEMBAYARAN :
13. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI :

RAHA,
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KAB. MUNA

PERHATIAN :

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS DIBAYAR.
2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.
3. PABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.
4. PEMBAYARAN INI BUKAN MERUPAKAN IZIN PENGAMBILAN / PEMANFAATAN AIR TANAH.

----- POTONG -----

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKPD PAJAK AIR TANAH	DITERIMA TGL :
NOMOR SKPD :	TANDA TANGAN :
NAMA WAJIB PAJAK :	
MASA PAJAK :	(.....)